



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"**

**"PENGEMBANGAN DESA KETAHANAN PANGAN MENJADI  
DESA EDUWISATA"**

Oleh

**"Drs. Chusmeru, M.Si dan Dr. Drs. Bambang Kuncoro, M.Si"**  
**"FISIP Universitas Jenderal Soedirman"**  
**"chusmeru@yahoo.com"**

**ABSTRAK**

Potensi ketahanan pangan dan kearifian lokal yang dimiliki masyarakat Desa Wonoharjo dan Desa Serang menjadi modal utama dalam pengembangan kawasan Agrowisata dan Eduwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengembangan ketahanan pangan menjadi desa eduwisata. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus. Informan penelitian ditentukan secara purposif terdiri dari kelompok tani, kelompok usaha pengurus agrowisata, dan perangkat desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dan Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis pengembangan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan pada tahapan penyuluhan dan pelatihan, namun belum maksimal pada kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, strategi promosi dan pemasaran serta kemitraan. (2) Desa Wonoharjo yang memiliki potensi ketahanan pangan dapat mengadopsi keberhasilan Desa Serang Karangreja sebagai desa agrowisata dan eduwisata berbasis ketahanan pangan.

Kata kunci: *eduwisata, kearifan lokal, ketahanan pangan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat*

**ABSTRACT**

Wonoharjo Village and Serang Village have the potential for food security and local wisdom which are the main capital in the development of Agro Tourism and Education areas to improve welfare and independence. The study aims to analyze the development of food security into an educational tourism (edutourism) village. The study used qualitative method of case study. The informants were determined purposively consisting of farmer groups, agro-tourism business groups, and village officials in Wonoharjo Village Rowokele Sub-District Kebumen District and Serang Village Karangreja Sub-District Purbalingga District. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis used community development analysis. The results showed: (1) The implementation of community empowerment programs that have been carried out at the stages of counseling and training, but not maximally in the activities of assistance, monitoring, evaluation, promotion and marketing strategies and partnerships. (2) Wonoharjo Village, which has food security potential, could be adopt the success of Serang Karangreja Village as agro-tourism and edu-tourism village based on food security.

Keywords: *community empowerment, edutourism, entrepreneurship, food security, local wisdom*



## **PENDAHULUAN**

Dinamika pembangunan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang saling berkaitan, yaitu bertambahnya jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan, produktivitas komoditas bahan pokok tergantung pada impor, dan kekurangan gizi, akibatnya sulit memenuhi kebutuhan hidup karena semakin tingginya harga bahan pokok. Penyebab lainnya dari dampak industrialisasi skala besar yang tidak sesuai dengan hasil analisis dampak lingkungan, sehingga terjadi kesalahan alih fungsi lahan, terjadi pencemaran lingkungan seperti polusi udara dan limbah kimia, kemudian tidak mendukung kepada sektor pertanian, karena terjadi penyempitan lahan pertanian, berkurangnya generasi petani yang kurang diminatinya bidang pertanian, terancamnya ketahanan pangan sebagai dasar kebutuhan masyarakat. Menurut Purwanto (2003) dan Suratmo (2004) dampak industri yaitu kerusakan jalan, sumber air menjadi kering, kemacetan lalu lintas, limbah, polusi udara, dan terjadi alih fungsi lahan yang kurang tepat. Santosa et al. (2011) menegaskan terjadi implikasi alih fungsi lahan dari lahan yang subur untuk pertanian terutama sawah yang digantikan untuk pembangunan infrastruktur dan industrialisasi sehingga semakin berkurangnya produksi pertanian yang mengakibatkan kerawanan pangan secara nasional dan menjadi ancaman pada stabilitas ekonomi dan politik yang menjadikan ketergantungan pada negara lainnya. Hermita (2015) menyatakan upaya untuk menambah lahan dan produksi pertanian masih terdapat permasalahan diantaranya masih terjadi perambahan hutan dan merusak konservasi lingkungan yang memiliki potensi, keindahan dan alami. Pradini et al. (2017) akibat kegiatan industri adanya pencemaran air, udara dan tanah yang terus meningkat, namun tidak diimbangi antisipasi lingkungan untuk menghadapi pencemaran.

Problematika tersebut menjadi catatan penting dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Lebih lanjut dalam bagian penjelasannya bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keadaan penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman- ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Menurut Suryana (2014) permasalahan dalam ketahanan pangan yaitu dinamika selera konsumen, tingginya pertumbuhan penduduk dan persaingan permintaan komoditas pangan, pakan, dan bahan baku energi.

Dengan demikian dalam pembangunan salah satu bidang terpenting adalah mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang menyangkut kebutuhan pokok dan mendasar yang menyangkut



hajat hidup orang banyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 1, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pasal 3, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Desa dapat mempertahankan potensi ketahanan pangan dengan pengembangan kewirausahaan melalui program pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mampu menjadi komoditas unggulan yang menjadi sumber penghasilan serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, ditinggalkan warganya karena menjadi sumber urbanisasi dan beban pembangunan diperkotaan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara partisipatif, artinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melibatkan masyarakat desa itu sendiri.

Pemberdayaan untuk pengembangan kewirausahaan bertujuan memfasilitasi dan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan (*sustainable development*) jangka panjang. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi (Mardikanto & Soebiato 2012). Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan mengoptimalkan daya masyarakat melalui konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial dengan berpusat pada rakyat, partisipatif dan berkesinambungan (Soleh 2014). Dengan demikian, pemerintah perlu lebih pro aktif melakukan komunikasi pembangunan partisipatif yang lebih humanis dan kooperatif dengan membuat agenda pertemuan atau dialog dengan warga masyarakat secara terbuka dan harmonis.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2013, telah menempatkan pada urutan pertama isu strategis pembangunan tentang stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan dan prioritas pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memantapkan ketahanan pangan. Laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2016, menyatakan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar. Tujuannya



untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Hasil capaian kegiatan prioritas Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 yaitu (1) Pengembangan kawasan rumah pangan lestari di desa (77.96%). (2) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat seperti Gapoktan (87.99%). (3) Lumbung pangan masyarakat (95.30%). (4) Kawasan mandiri pangan (88.54%).

Terdapat beberapa permasalahan ketahanan pangan, Menurut Dewan ketahanan pangan (2006) dan Suryana (2014) kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Masih banyak masyarakat yang mempunyai daya beli rendah dan tidak memiliki akses atas pangan, maka mengakibatkan kerawanan pangan yang parah dan akan mengancam potensi terbaik dari generasi sumberdaya manusia. Santosa et al. (2011) menyatakan, potensi sumber daya hayati yang sangat kaya di Indonesia, berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi penduduknya yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Maka harus ada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga. Sulaiman et al. (2016) mengemukakan, masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di rumah masih belum dikembangkan sebagai komoditas yang bisa dikomersilkan atau berorientasi pasar dan hanya bersifat sambilan serta hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, kemudian kurang didukung teknologi dan program pendampingan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2016, diantaranya belum optimalnya pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya baik alam, manusia, budaya, teknologi, dan finansial untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, aksesibilitas pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; serta mengembangkan panganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Penanggulangan masalah ketahanan pangan dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan pengembangan kewirausahaan melalui program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat desa. Menurut Saputra dan Nurizka (2012) serta Sholikah et al. (2017) kekurangan gizi masyarakat di desa dan perkotaan membawa dampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas, sehingga memerlukan pemberdayaan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Soegiharto (2011) menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat terutama perempuan sebagai kader dalam ketahanan pangan lokal. Sulaiman et al. (2016) menyatakan pembangunan desa menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah dan nasional karena desa



memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting dan strategis untuk menganalisis pengembangan ketahanan pangan menjadi desa eduwisata di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagai desa beprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2018 dalam ketahanan pangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, yaitu menggunakan pendekatan spesifik untuk mengeksplorasi fakta dalam fenomena yang lebih mendalam (Subyantoro & Suwanto 2007).

Lokasi penelitian di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen merupakan juara 1 prestasi Desa Ketahanan Pangan Mandiri tingkat Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ditentukan dengan purposive terdiri dari kelompok tani, kelompok wirausaha, dan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.

Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian pengembangan komunitas yaitu mengidentifikasi, mengkatagori masalah, tujuan umum dan khusus, kemudian menganalisis masalah dan menyiapkan rencana tindakan serta mengevaluasi seluruh proses, rencana tindakan (Huraerah 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Ketahanan Pangan di Wonoharjo**

Desa Wonoharjo terletak di Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan luas wilayah 919.654 Ha dan jumlah penduduk 6.460 jiwa. Wilayah Desa Wonoharjo terdiri dari 267,720 Ha permukiman; 194,276 Ha tanah sawah; 451,158 Ha tanah tegalan; 1,000 Ha perikanan; dan 5,500 Ha tanah bengkok.

Dengan memperhatikan luas lahan pertanian dan jumlah penduduk, maka Desa Wonoharjo memiliki potensi di bidang pertanian terutama tanaman pangan. Hal ini tentu menjadi peluang yang besar bagi masyarakat Desa Wonoharjo untuk menjadi pelaku atau wirausaha di bidang pangan berbasis pertanian baik secara individu maupun kelompok tani. Sebanyak 85% penduduk Desa Wonoharjo merupakan petani yang sebagian besar tergabung dalam berbagai macam kelompok tani. Kelompok-kelompok tersebut bergerak di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil. Pembentukan kelompok tani di Desa Wonoharjo merupakan upaya pemerintah desa untuk mempermudah dalam melakukan penyuluhan atau pelatihan mengenai teknologi-teknologi dan program-program baru serta pemasaran produk olahan dari anggota.



Dengan bergabungnya masyarakat ke kelompok tani, maka proses pemberdayaan akan lebih mudah. Pemerintah desa bekerja sama dengan Dinas Pertanian bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mengidentifikasi pada akar persoalannya, kemudian akan diketahui potensi yang ada di masyarakat dan lingkungannya. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yakni mencapai pada kemandirian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Masyarakat Desa Wonoharjo sebagian besar termasuk yang berpartisipasi aktif dan memiliki inisiatif untuk membangun desanya sendiri. Dengan pelatihan yang datang dari pemerintah desa dan dinas serta melakukan studi banding ke daerah lain, masyarakat Desa Wonoharjo sudah mulai menuju tahap kemandirian masyarakat. Namun, masih diperlukan pengembangan secara berkelanjutan agar masyarakat bisa merasakan dampak yang positif dari proses pemberdayaan masyarakat. Melalui hasil pertaniannya yang cukup melimpah, Desa Wonoharjo memfokuskan dalam melakukan pemberdayaan di kelompok-kelompok tani. Hal ini yang sekiranya membuahkan hasil, karena Desa Wonoharjo meraih penghargaan dalam ajang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat Jawa Tengah, yakni sebagai Juara I Pembina Ketahanan Pangan (Sri Pambudi Murnianto, Kepala Desa Wonoharjo).

Penghargaan yang berhasil diraih oleh Desa Wonoharjo dalam bidang ketahanan pangan menunjukkan bahwa mereka mampu mengembangkan desanya khususnya dalam bidang pertanian (tanaman pangan). Keberhasilan yang diraih tidak semata-mata menjadi kebanggaan yang terlalu dijunjung tinggi, namun masyarakat Desa Wonoharjo terus berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian hingga ke tahap pengolahan. Dengan demikian, masyarakat Desa Wonoharjo bisa menjadi masyarakat yang mandiri dalam bidang ketahanan pangan yang notabene menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam ketahanan pangan, Desa Wonoharjo memiliki komoditas utama yakni produksi gula semut. Gula semut atau bisa disebut gula kristal merupakan gula merah (gula jawa) yang diolah dalam bentuk bubuk. Produksi gula semut Desa Wonoharjo ini sudah menembus ke pasar internasional, karena dari bahan organik (dimulai dari pohon kelapa hingga pada tahap pengolahan tidak menggunakan campuran apapun) dan kualitasnya sudah terjamin karena sudah tersertifikasi. Untuk sampai ke pasar internasional, produksi gula semut harus benar-benar dinilai kualitasnya, bahkan pohon kelapanya pun tidak bisa sembarangan untuk diambil niranya, harus diuji terlebih dahulu mana pohon kelapa yang kualitas baik dan mana yang tidak.

Adapun kekuatannya yaitu situasi dan kondisi yang dimiliki oleh kelompok tani Nira Raharja yaitu memiliki kelebihan mampu mengelola potensi lahan pertanian dan perkebunan dengan baik. Kelompok Nira Raharja memiliki kualitas baik karena sudah mampu demi berdaya saing global dalam bidang ekspor pangan dengan klaim organik. Keunikan ekspor gula semut menjadi komoditi baru yang di luar negeri biasa disebut dengan brown sugar, penggunaan gula semut digemari pasar Internasional karena banyak manfaat seperti rendah gula baik untuk kesehatan. Kelompok Tani Nira Raharja



mendapatkan penjualan karena menjalin mitra dengan Koperasi Srikandi, dan setelah menjalani sertifikasi akan melebur dengan kelompok tani Sumber Rejeki untuk mempermudah mereka dalam kelompok yang sudah berbadan hukum. Konsumen melihat kelebihan produk dinilai dari proses produksi yang menggunakan teknik tradisional sehingga tidak mengurangi kualitas dari produk.

Kelemahannya, dalam kelompok tani Nira Raharja, diperlukan adanya peningkatan intensitas pertemuan kelompok, memaksimalkan penggunaan alat produksi untuk menunjang hasil, lebih berani dalam melakukan inovasi produk baru agar tetap berjalan bisnisnya. Yang harus dihindari kelompok Nira Raharja adalah hilang sumber daya manusianya, karena tanpa SDM tidak ada yang dapat mengelola kelanjutan. Konsumen lokal merasa bahwa harga yang ditawarkan terlalu mahal daripada gula pasir biasa maupun gula aren, selain itu konsumen merasa bahwa rasa yang dihasilkan dari produk bukan selera lokal karena dirasa sedikit pahit dan kurang sadar akan manfaat dari produk sendiri.

Peluang, terdapat kesempatan bisnis terlihat sangat baik untuk keberlangsungan Kelompok Tani Nira Raharja sekaligus mensejahterakan anggota kelompok tersebut. Pengembangan trend ada baiknya dicoba dengan mencoba mempromosikan produk ke online shop yang mungkin nantinya dikelola oleh salah satu atau dua anggota kelompok tersebut untuk dapat menambah pendapatan dari mitra.

Sedangkan ancamanya, terdapat persaingan dengan penghasil produk yang sama serta sudah sama-sama berani ekspor ke luar negeri. Kelompok Tani Nira Raharja mengandalkan mitra untuk tahap pengemasan hingga ekspor sedangkan gula semut Pengandaran sudah bisa menembus pasar internasional langsung tanpa perantara. Peran pemerintah seharusnya lebih mendukung untuk bisa beroperasi secara mandiri tanpa mitra.

### **Mengadopsi Konsep Eduwisata berbasis Ketahanan Pangan**

Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebupen yang memiliki potensi ketahanan pangan dan kelompok usaha yang sudah berkembang dan maju dapat dikembangkan lagimenjadi desa wisata dengan konsep agrowisata dan edukasi serta wisata (eduwisata) dengan mengadopsi atau menimba pengalaman kepada Desa Serang memiliki yang unikan, dukungan sumber daya alam yang asri dan indah, kearifan lokal, ketahanan pangan berupa hasil produk holtikultura yang khas menjadikan daya tarik bukan saja sebagai kawasan agrowisata, juga sebagai kawasan eduwisata atau edukasi dan wisata. Eduwisata adalah daerah yang memiliki potensi dan kawasan wisata berupa keindahan alam dan lingkungan, ciri khas secara sosial kemasyarakatan dan produk ekonomi yang dihasilkan yang bisa menjadi tempat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pembentukan karakter sebagai bentuk tempat pendidikan, pelatihan, kajian, riset dan praktikum. Eduwisata memberikan metode pendidikan yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengeksplorasi dan mengkonstruksi realitas faktual secara langsung pada objek lingkungan alam, sosial budaya masyarakat, proses pembuatan keputusan, kelembagaan masyarakat, kearifan lokal, kegiatan ekonomi dan proses produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan, serta adopsi inovasi .



Desa Serang sebagai kawasan agrowisata dan eduwisata sering menjadi tempat diselenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan kegiatan outbond, dan perkemahan, kemudian program penelitian dan kunjungan ilmiah untuk riset, praktikum serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari perguruan tinggi. Desa Serang juga menjadi tempat berbagai program pemberdayaan seperti penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam satu tahun terdapat empat sampai lima kegiatan. Menurut Hidayat (2011) dalam strategi perencanaan wisata dapat menganalisis penyediaan program pelatihan 'customer care' untuk perusahaan lokal untuk mengatur pelatihan dengan perusahaan. Kegiatan tamasa (sightseeing), berkemah (camping), penelitian, pendidikan dan pelatihan, aktivitas pecinta alam dan rekreasi. Ridwan et al. (2016) menyatakan kawasan wisata berbasis kearifan lokal selain memberikan dan mengandalkan keindahan alam serta budaya lokal, dapat juga dimanfaatkan serta digunakan sebagai sumber materi belajar dengan metode outdoor study. Program pemberdayaan yang diberikan berupa proses penanggulangan hama, peningkatan produksi pertanian, program adopsi dan difusi inovasi seperti penanaman dengan teknik hidroponik, rekayasa penanaman untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim dengan membangun *greenhouse*, pembibitan komoditas stroberi unggulan, dan pembuatan pupuk organik serta penyimpanan hasil panen dalam mesin pendingin kapasitas besar. Lebih lanjut program pasca panen seperti pengolahan dan pengemasan untuk buah stroberi menjadi minuman sirup dan teh daun stroberi, makanan olahan dodol serta getuk. Namun produk hortikultura sebagai ketahanan pangan lokal yang menjadi komoditas unggulan dan ciri khas yang unik, belum secara maksimal dijadikan produk yang dapat dijual secara komersil kepada pengunjung. Fasilitas produk hortikultura yang ditawarkan kepada pengunjung yaitu petik langsung di kebun stroberi, tetapi untuk jenis produk sayuran lainnya belum dikomersilkan seperti membuat Agrimart yaitu mini market yang menjual produk-produk sayuran dan buah-buahan unggulan yang segar dengan pengemasan yang bagus menggunakan mesin plastik vakum sealer. Begitupun produk makanan dan minuman olahan sebagai hasil pasca panen untuk memberikan nilai tambah bagi petani, hasil produksinya belum berskesinambungan, sehingga tidak menjadi makanan khas yang tersedia setiap saat untuk dinikmati langsung dan menjadi oleh-oleh yang dapat dinikmati dan bawa wisatawan.

Kurangnya memanfaatkan keunggulan potensi produk hortikultura sebagai ketahanan pangan yang khas dan unik untuk mengembangkan kawasan agrowisata di Desa Serang, disebabkan oleh: (1) Hasil panen hortikultura terutama buah stroberi lebih diorientasikan untuk dijual langsung kepada pengepul atau tengkulak, karena sudah ada ikatan persaudaraan yang lama sebagai tradisi dengan tengkulak dan keuntungan yang didapatkan bisa langsung diterima, daripada diolah lagi menjadi makanan atau minuman yang membutuhkan proses dan waktu untuk lama untuk dijual kepada pengunjung. Keuntungan melakukan transaksi dengan tengkulak yaitu hasil panen sudah jelas laku





terjual, tidak ada beban ongkos transportasi dan resiko distribusi hasil panen untuk dikirimkan ke luar lokasi desa yang jauh, karena langsung di ambil oleh tengkulak. Ikatan saling membantu antara masyarakat petani dengan pihak tengkulak yang bisa memberikan jaminan pinjaman baik modal usaha untuk pembibitan dan pupuk serta kebutuhan lainnya. Menurut hasil kajian Kementerian Perdagangan (2014) menyebutkan tengkulak berperan besar dalam menentukan sirkulasi kapital yaitu pedagang perantara yang melakukan transaksi jual beli dan yang hanya melakukan jasa perantara yang disebut perantara (middleman) atau broker.

(2) Buah stroberi terkadang tidak bisa mempertahankan keberlanjutan kuantitasnya karena terkendala curah hujan yang lama dan serangan hama. Permasalahan ini sudah diantisipasi dengan meminta bantuan pada dinas pertanian pemerintah daerah untuk meneliti dan menanggulangi hama, tetapi belum ada hasil yang diinformasikan atau disosialisasikan dan keberlanjutannya. Antisipasi berikutnya yaitu mendapat bantuan pembuatan greenhouse dari pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi sebanyak empat zona. Namun keberlangsungan penggunaan dan pemeliharannya greenhouse tidak optimal, karena penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dari alih pengetahuan serta adopsi teknologi kurang maksimal, tidak ada pendampingan, keberlanjutan, monitoring dan evaluasi. Implementasi program penanaman dengan greenhouse memerlukan pelatihan dan pemeliharaan secara komprehensif, karena cukup rumit dan kompleks. Sehingga kelompok tani kembali lagi kepada proses penanaman konvensional, lebih tertarik dan menguntungkan ikut menjadi pengelola atau pengurus tempat wisata. Menurut Kendala dalam implementasi greenhouse adalah mengontrol lingkungan antaranya suhu dan kelembaban udara serta kontrol distribusi air dan pupuk. Kebutuhan terhadap sistem monitor dan kontrol lingkungan ini yang menyebabkan bangunan greenhouse tergolong bangunan yang mahal. Pemeliharaan greenhouse membutuhkan ketekunan karena sistem kontrol pengkondisian suhu dan kelembaban sangat menentukan, dibuat sesuai dengan faktor iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, termasuk teknik penyiraman baik secara manual atau konvensional dan otomatis.

(3) Kurangnya pemerataan penerima manfaat (beneficiaries) dari pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga terdapat dominasi dari beberapa kelompok binaan (*community worker*) yang selalu mendapatkan program pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan informasi dan koordinasi kepada masyarakat aksesnya lebih dimiliki oleh kelompok yang dekat dan bagian dari kekuasaan pemerintah desa. Pihak perempuan kurang mendapat kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik di desa, rencana panen dan program pemberdayaan. Peterman et al. (2010) menyatakan, ketidaksetaraan dan kurangnya perhatian terhadap gender dalam pembangunan pertanian menjadi penyebab rendahnya produktivitas, hilangnya pendapatan, dan lebih tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya gizi. Menurut Sulaiman et al. (2015) rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan karena peran dan aktivitas kelembagaan di



masyarakat masih didominasi laki-laki, perempuan lebih disibukkan untuk mengurus kegiatan rumah tangga serta perempuan masih kurang berani berpendapat dan berfikir kritis.

Padahal salah satu tujuan pembangunan pedesaan dan kebijakan yang penting yaitu memastikan adanya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan (Kakati & Behera, 2014; Dhak, 2014). Keterlibatan berbagai pihak untuk bisa berpartisipasi sebagai ciri demokratisasi yang sangat penting dalam pembangunan (Goidel et al. 2008; Choi 2014). Program pemberdayaan pasca panen berupa penyuluhan dan pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil holtikultura kurang mendapat pendampingan dan jaringan kemitraan untuk strategi pemasaran, sehingga belum mencapai kemandirian. Lokasi wisata yang ditawarkan telah dinilai sangat cukup dalam memenuhi tambahan keuntungan selain dari hasil panen, sehingga tidak lagi tertarik untuk melanjutkan program pemberdayaan pasca panen dengan membuat dan menjual produk minuman dan makanan olahan. Pemimpin harus lebih transparan dengan anggota terkait dengan bantuan yang diterima untuk mencegah persepsi negatif anggota kelompok tani. Sebaiknya pendampingan bukan hanya dilakukan untuk kelompok, tetapi untuk petani secara individu agar terlihat secara nyata kebutuhan yang diperlukan. Menurut Gunawan (2016) perlu ada kegiatan pendampingan secara berkesinambungan dari pemerintah daerah, praktisi dan ahli pariwisata, serta dukunga pasar lokal dalam Agrowisata.

(4) Program pemberdayaan sudah sering diberikan dari berbagai lembaga, tetapi kurang berkelanjutan dan komprehensif, tidak ada monitoring serta evaluasi kegiatan. Artinya banyak penyuluhan dan pelatihan yang diberikan tetapi tidak menyeluruh, tidak terpadu, dan tidak ada sinkronisasi, serta audit hasil dari lembaga penyelenggara program pemberdayaan. Sehingga masing-masing lembaga mengadakan pemberdayaan secara parsial sesuai kepentingannya, kurang melakukan evaluasi hasil, tidak bekerjasama, kurang ada pendampingan dan kemitraan antar lembaga. Pihak pemerintah desa juga kurang memberikan perhatian pada keberlanjutan program pemberdayaan yang telah diberikan, sehingga ketika ada pihak yang menawarkan dan melakukan program pemberdayaan tidak berdasarkan evaluasi dan melanjutkan lagi program yang sudah diberikan. Pihak yang memberikan program pemberdayaan seharusnya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil program pembangunan yang sudah diberikan pihak lain, kemudian dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak yang telah melakukan program pemberdayaan. Menurut Budi et al. (2013) pelaksanaan suatu program di masyarakat dalam pelaksanaannya masih kurang mendapatkan apresiasi dari para penerima manfaat karena kurangnya kesadaran dari peserta sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal. Dewi et al. (2013) menjelaskan bahwa meningkatkan akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu melibatkan semua pemangku kepentingan supaya dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata dan dapat berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk pemberdayaan masyarakat lokal.



(5) Faktor penghambat adanya pengembangan agrowisata khususnya untuk komoditas pasca panen seperti minuman dan makanan khas di Desa Serang yaitu belum ada pusat kuliner, atau warung makan, rumah makan dan agrimart. Hal ini membutuhkan kemitraan untuk mendatangkan investasi membangun infrastruktur baik jalan akses ke lokasi yang lebih luas dan bagus, pusat jajanan kuliner, agrimart dan rumah makan yang khas bersumber dari ketahanan pangan di Desa Serang. Menurut Parma (2014) permasalahan dalam agrowisata yaitu aturan desa, pengelolaan lembaga sosial dan budaya desa, luas serta kepemilikan lahan, system permodalan, pemanfaatan sumber daya, dan sistem penjualan. Saputra et al. (2016) menyatakan kawasan agrowisata memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur akses jalan dan fasilitas, pengaturan jadwal kunjungan dan pembuatan brosur paket wisata.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Desa Wonoharjo hampir sama dan dapat mengadopsi kesuksesan Desa Serang sebagai desa wisata memiliki potensi, ciri khas dan keunikan sebagai wilayah pegunungan yang asri, sejuk, dan memiliki karifan lokal, ketahanan pangan hortikultura yang menyediakan berbagai wahana dan fasilitas wisata.

Hal yang harus dipecahkan bersama antara Desa Wonoharjo dan Masyarakat Desa Serang yaitu masih tetap berorientasi untuk menjual hasil panen hortikulturnya kepada tengkulak supaya dapat langsung mendapat keuntungan daripada mengolah hasil pasca panen menjadi makanan dan minuman yang khas dijadikan buah tangan pengunjung.

Desa Wonoharjo dapat kerjasama, studi banding dan bermitra dengan Desa Serang yang tidak hanya sebagai wilayah agrowisata tetapi dapat dijadikan lokasi eduwisata, karena sering dijadikan lokasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), riset, praktikum, pengandian masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), kegiatan out bond, dan perkemahan bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta.

Berbagai program pemberdayaan dapat di adopsi oleh Desa Wonoharjo yang telah banyak dilaksanakan di Desa Serang seperti penyuluhan dan pelatihan mulai dari penanaman pertanian, penanggulangan hama, adopsi inovasi tentang hidroponik dan greenhouse, pengolahan pasca panen untuk memproduksi serta memiliki nilai tambah penghasilan dari pembuatan makanan dan minuman yang khas dari buah stroberi untuk disajikan pada pengunjung dan menjadi buah tangan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perlu berdasarkan hasil riset supaya dapat mengidentifikasi selain permasalahan, potensi dan prospek, juga program pemberdayaan kewirausahaan yang telah diterima oleh masyarakat.



Program pemberdayaan masyarakat penting dilaksanakan secara komprehensif, keberlanjutan dan terintegrasi mulai dari perencanaan program, pelaksanaan seperti penyuluhan, pelatihan, pendampingan, monitoring, evaluasi, promosi, pemasaran serta kemitraan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Alloh SWT kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kami yaitu melaksanakan penelitian kompetensi Unsoed 2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed yang telah memberikan kesempatan mendanai penelitian kami sehingga dapat mengibarkan lembaga Unsoed dan memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya pada informan dan pemerintah desa tempat lokasi penelitian kami yaitu kelompok ketahanan pangan dan kelompok usaha ekonomi serta pemerintah desa baik Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dan Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi, N. D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. 2013. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(5) : 862-871.
- Choi, I. 2014. What explains the success of participatory budgeting? Evidence from seoul autonomous districts. *Journal of Public Deliberation* 10(9): 1-19.
- Dewi, M.H.U., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. *Kawistara*, 3(2), 129-139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dhak, B. 2014. Food security act, 2013: Oppurtunities and challenges for the Backward States in India. *Journal of Rural Development* 33(4) :475-491
- Goidel, R. K., Freeman, C. M., Procopio, S., & Zewe C. F. 2008. Who participates in the public square and does it matter?. *Public Opinion Quarterly*, 72(4), 792-803. <https://doi.org/10.1093/poq/nfn043> Government Regulation No. 44/1997 on partnership.
- Gunawan, I. M. 2016. Pengembangan Agrowisata untuk Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Budaya di Desa Kerta, Payangan Gianyar. *Jumpa*, 3(1), 156-174. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2016.v03.i01.p11>
- Hermita, N. 2010. Potensi Pengembangan Tumbuhan Obat Sebagai Objek Ekowisata Di Desa Pakuli Kawasan Penyangga Taman Nasional Lore Lindu Propinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*. UGM. Yogyakarta.
- Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 1(1), 1-33. <https://doi.org/10.17509/thej.v1i1.1879>



- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung.
- Kakati, B. K., & Behera, M. C. 2014. Women workers and their status in MGNREG programme: A study in Jharkhand. *Journal of Rural Development* 33(3) :281-290.
- Kenny, S. (1999). *Developing Communities For The Future Development The Australia*. Nelson Australia Prelimited. Australia.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Parma, P. G. 2014. Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian sebagai Prime Mover Pembangunan Kawasan Daerah Penyangga Pembangunan (DPP) Destinasi Wisata Kintamani Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 380-393. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2928>
- Peterman, A., Behrman, J., & Quisumbing, A. 2011. A Review of Empirical Evidence on Gender Differences in Nonland Agricultural Inputs, Technology, and Services in Developing Countries, United Nation: International Food Policy Research Institute.
- Pradini, DP., Rahayu, MJ., & Putri, RA., 2017. Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri pada Kawasan Pemukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Arsitektura* 15(1): 215-220.
- Purwanto. 2003. Perubahan pola pencaharian nafkah masyarakat petani di sekitar Kawasan Industri (Kasus di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur). *Tesis*. IPB. Bogor.
- Ridwan, M., Fatchan A., & Astina I. K. 2016. Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1- 10. <https://doi.org/10.17977/jp.v1i1.6601>
- Santosa, I.G.N., Adnyana, G.M., & Dinata, I.K.K. 2011. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras. *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian*. Bengkulu 7 Juli 2011: 1-11.
- Saputra, W., & Nurriszka, RH. 2012. Faktor Demografi dan Gizi Buruk dan Gizi Kurang. *Jurnal Makara Kesehatan* 16(2): 95-101.
- Sholikhah, A., Rustiana, ER., & Yuniastuti, A. 2017. Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Pedesaan dan Perkotaan. *Public Health Perspective Journal* 2(1): 9 – 18.
- Soegiharto, S. 2011. Pemberdayaan Perempuan di Pemukiman Transmigrasi untuk Percepatan Penganekaragaman pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. *Jurnal Ketransmigrasian* 28(2) : 89-102.
- Soleh, C. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Fokusmedia. Bandung.
- Subyantoto, A., & Suwanto. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Penerbit Andi. Yogyakarta.



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX" 19-20 November 2019  
Purwokerto*

---

Sulaiman, A.I., Lubis D.P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. 2015. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar*, 31(2), 367-378. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>

Sulaiman, A.I., Sugito, T., & Sabiq, A. 2016. Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 233-252. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.734>

Suratmo, G. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta:

Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 32(2): 123-135.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.